

KATA PENGANTAR

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas 3 (Tiga) utama yaitu 1) ketersediaan pangan, 2) keterjangkauan dan 3) pemenuhan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut. Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan.

Berkaitan dengan cadangan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara melaksanakan Program Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Program LPM tersebut sudah dilaksanakan pada 10 Kecamatan dan 25 Desa/Kelurahan.

Dalam Rangka mengetahui pelaksanaan program Pembangunan LPM tersebut sekaligus untuk menyusun rekomendasi keberlanjutan program maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kab. Kutai Kartanegara melaksanakan Kajian Kebijakan Ketahanan Pangan (Fokus pada Kajian LPM). Dalam pelaksanaannya dikerjasamakan dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Univ. Mulawarman. Kami menyampaikan terima kasih kepada ULS-PPID Univ. Mulawarman yang telah terlibat aktif dalam kajian ini melalui penyediaan Tenaga Ahli, yang terdiri dari : 1) Prof. Ir. Suyadi, MS, P.hD., 2) Dr. Ir. H. Fahrunsyah, MP, 3) Rahadian Adi Prasetyo, SP, M.Si,dan 4) Sofian, M.Sc .

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui program Pembangunan LPM di Kab. Kutai Kartanegara.

Tenggarong, Desember 2022
PLT. Kepala
Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara

Dr. Bahari Jokosusilo, S.PT., M.P
NIP. 19670923199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Pokok Permasalahan	I-2
1.3. Tujuan.....	I-3
1.4. Luaran Kajian.....	I-3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	II-1
BAB III METODE PENDEKATAN	III-1
3.1. Ruang Lingkup	III-1
3.2. Prosedur Pengumpulan Data	III-1
3.3. Analisis Data	III-2
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	IV-1
BAB V HASIL KAJIAN DAN DISKUSI	V-1
5.1. Hasil-hasil Kajian	V-1
5.1.1. Wilayah Pantai	V-2
5.1.2. Wilayah Tengah	V-9
5.1.3. Wilayah Hulu	V-14
5.2. Diskusi	V-18
5.3. Pengembangan Program dan Kegiatan LPM	V-21
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	VI-1
6.1. Kesimpulan	VI-1
6.2. Rekomendasi	VI-1
DAFTAR PUSTAKA.....	D-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	L-1

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Lokus Kecamatan dan Kelurahan/Desa Sampel Pelaksanaan Program LPM di Kabupaten Kutai Kartanegara.....	III-1
Tabel 3.2.	Indikator Tujuan untuk Mengetahui Kondisi LPM yang Dibangun Melalui Alokasi Pembiayaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	III-2
Tabel 3.3.	Indikator Tujuan untuk Mengetahui Tata Kelola/ Pengelolaan, Pola Kemitraan dan Permasalahan yang Dihadapi Dalam Memanfaatkan Keberadaan LPM.....	III-3
Tabel 3.4.	Indikator Tujuan untuk Mengetahui Pola Pembinaan dan Pendampingan LPM yang Telah Dilakukan oleh Instansi Berwenang/Pemangku Kepentingan Lainnya.	III-3
Tabel 4.1.	Penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan distribusi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur (BPS KALTIM, 2022)	IV-1
Tabel 4.2.	Produksi Beras Tahun 2020 dan 2021 Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (BPS KALTIM, 2021).....	IV-2
Tabel 4.3.	Perkembangan Produksi Padi Tahun 2020 dan 2021 Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (BPS KALTIM, 2021)	IV-3
Tabel 4.4.	Perkembangan Luas Panen Padi Tahun 2020 dan 2021 Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (BPS KALTIM, 2021)	IV-4
Tabel 4.5.	Luas Lahan Baku Sawah Kalimantan Timur (Sumber: SK Menteri ATR Nomor: 686/SK-PG.03.03/XII/2019)	IV-5
Tabel 4.6.	Jumlah dan Sebaran LPM di Kabupaten Kutai Kartanegara (Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kabupaten Kutai Kartanegara)	IV-6
Tabel 5.1.	Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara	V-3
Tabel 5.2.	Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Kelurahan Tama Pole, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara	V-5

Tabel 5.3. Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara.	V-7
Tabel 5.4. Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Desa Karya Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.	V-9
Tabel 5.5. Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa-Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.	V-11
Tabel 5.6. Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Desa Loa-Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.	V-13
Tabel 5.7. Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Desa Muhuran, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara.	V-15
Tabel 5.8. Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Desa Panca Jaya, Kecamatan Kota Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara.	V-17
Tabel 5.9. Sumber Dana Pembangunan LPM di Kabupaten Kutai Kartanegara.	V-22

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1.** Kerangka Pikir Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat II-5
- Gambar 5.1.** Model Pengembangan dan Operasional Kegiatan LPM..... V-21

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem, subsistem utamanya adalah 1) ketersediaan pangan, 2) keterjangkauan dan 3) pemenuhan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut. Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan.

Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa, oleh karena produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, tetapi volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya serta stabil penyediaannya dari waktu ke waktu. Untuk itu, aspek cadangan pangan merupakan suatu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi sebagai penyangga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan, selain itu dapat juga digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara yang disebabkan oleh gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam.

Penumbuhan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat (LPM) merupakan upaya untuk memastikan tersedianya cadangan pangan pada level kelompok masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam Pasal 33 ayat (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluasluasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat; ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dari kerawanan pangan, dengan memfasilitasi 1) pembangunan fisik lumbung, 2) pengisian cadangan pangan dan 2) penguatan kelembagaan kelompok. Melalui pemberdayaan tersebut diharapkan masyarakat dapat mengelola cadangan pangan yang ada di kelompok, dan juga dapat meningkatkan peran dalam menjalankan fungsi ekonomi bagi anggotanya sehingga mampu mempertahankan dan mengembangkan cadangan pangan yang dimiliki.

Pedoman pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 17/Permetan/HK.140/4/2015, yang digunakan sebagai acuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan aktivitas-aktivitas prioritas nasional.

1.2. Pokok Permasalahan

Kajian Kebijakan Ketahanan pangan ini dilakukan atas dasar pertimbangan untuk mencermati dan mengevaluasi program pembangunan LPM yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun rumusan/pokok permasalahan dari Tema/Topik Kajian Kebijakan Ketahanan Pangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kondisi LPM yang dibangun melalui alokasi pembiayaan APBN, APBD-Provinsi dan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2) Bagaimana tata kelola/pengelolaan, pola kemitraan dan permasalahan yang dihadapi dalam memanfaatkan keberadaan LPM.
- 3) Bagaimana pola pembinaan dan pendampingan LPM yang telah dilakukan oleh Instansi berwenang/pemangku kepentingan lainnya.
- 4) Rekomendasi apa yang diperlukan/dirumuskan dalam rangka perbaikan dan pengembangan program dan kegiatan dalam

implementasi kebijakan ketahanan pangan, khususnya dalam hal pengelolaan LPM di Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa mendatang.

1.3. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, maka tujuan Kajian Kebijakan Ketahanan Pangan (khususnya terkait dengan pengelolaan LPM) ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi LPM yang dibangun melalui alokasi pembiayaan APBN, APBD-Provinsi dan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk Mengetahui tata kelola/pengelolaan, pola kemitraan dan permasalahan yang dihadapi dalam memanfaatkan keberadaan LPM.
3. Untuk mengetahui pola pembinaan dan pendampingan LPM yang telah dilakukan oleh Instansi berwenang/pemangku kepentingan lainnya.
4. Menyusun rekomendasi perbaikan dan pengembangan program dan kegiatan dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan, khususnya dalam hal pengelolaan LPM di Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa mendatang.

1.4. Keluaran (Out-Put) Kajian

Kajian ini menghasilkan keluaran (*out-put*) berupa dokumen yang memuat: 1) Kondisi LPM yang sudah dibangun, 2) Tata kelola, pola kemitraan dan permasalahan yang dihadapi dalam memanfaatkan keberadaan LPM, 3) Pola pembinaan dan pendampingan LPM yang sudah dilakukan oleh instansi berwenang/pemangku kepentingan dan 4) Rekomendasi perbaikan dan pengembangan program dan kegiatan dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan, khususnya dalam hal pengelolaan LPM di Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Konsepsi tentang ketahanan pangan telah banyak dirumuskan oleh para ahli dan organisasi, antara lain adalah sebagai berikut. Ketahanan pangan adalah suatu kondisi bahwa semua orang pada setiap waktu memiliki akses secara fisik, sosial ataupun ekonomi untuk mendapatkan pangan bagi seluruh anggota rumah tangga dengan kondisi pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya setempat. Sedangkan, ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan secara lokal dapat diwujudkan melalui proses kedaulatan pangan dan penganeekaragaman pangan (UU 18/2012).

Definisi dan pengertian ketahanan pangan menurut beberapa sumber antara lain adalah sebagai berikut:

- Menurut FAO (2016), ketahanan pangan adalah kondisi dimana individu atau rumah tangga menerima akses secara fisik ataupun ekonomi untuk mendapatkan pangan bagi seluruh anggota rumah tangga dan tidak berisiko kehilangan keduanya.
- Menurut Undang-undang No.18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah sebuah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
- Menurut DEPTAN (1996), ketahanan pangan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota

rumah tangga dalam jumlah, mutu dan ragam sesuai dengan budaya setempat dari waktu ke waktu agar tetap hidup sehat.

Kebijakan ketahanan pangan pada level kabupaten/kota merupakan implementasi dan penjabaran kebijakan level pemerintah pusat dan provinsi, sesuai dengan sumber daya yang tersedia secara lokalita. Implementasi kebijakan ketahanan pangan merupakan kegiatan lintas sektor yang harus dilaksanakan secara koordinatif. Simpul koordinasi dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan adalah tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: 1) ketersediaan pangan, (2) akses pangan, dan (3) pemanfaatan pangan.

Indikator akses pangan adalah semua individu atau rumah tangga dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi yang diperoleh dari produksi pangan pribadi ataupun pembelian dan bantuan pangan. Terdapat beberapa akses rumah tangga maupun individu dalam pangan, yaitu:

- 1) Akses ekonomi. Meliputi pada pendapatan, kesempatan kerja dan harga.
- 2) Akses fisik. Menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi).
- 3) Akses sosial. Menyangkut tentang preferensi pangan.

Penyerapan atau pemanfaatan pangan adalah kebutuhan seseorang untuk hidup sehat dalam menggunakan pangan seperti kebutuhan akan energi, gizi, air, dan kesehatan lingkungan, pengetahuan anggota rumah tangga pada sanitasi, ketersediaan air, fasilitas layanan kesehatan, penyuluhan gizi, dan tingkat kesehatan balita sangat efektif dalam penyerapan pangan.

Ketersediaan pangan adalah suatu kondisi seseorang dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam jumlah yang cukup aman, bergizi dan sehat yang berasal dari produksi negara sendiri ataupun

impor, maupun bantuan pangan sehingga dapat terpenuhinya jumlah kalori yang diperlukan bagi kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut PP 17/2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi: Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan Pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga (Permentan 17/2015). Cadangan pangan dapat berupa cadangan pangan nasional dan cadangan pangan masyarakat.

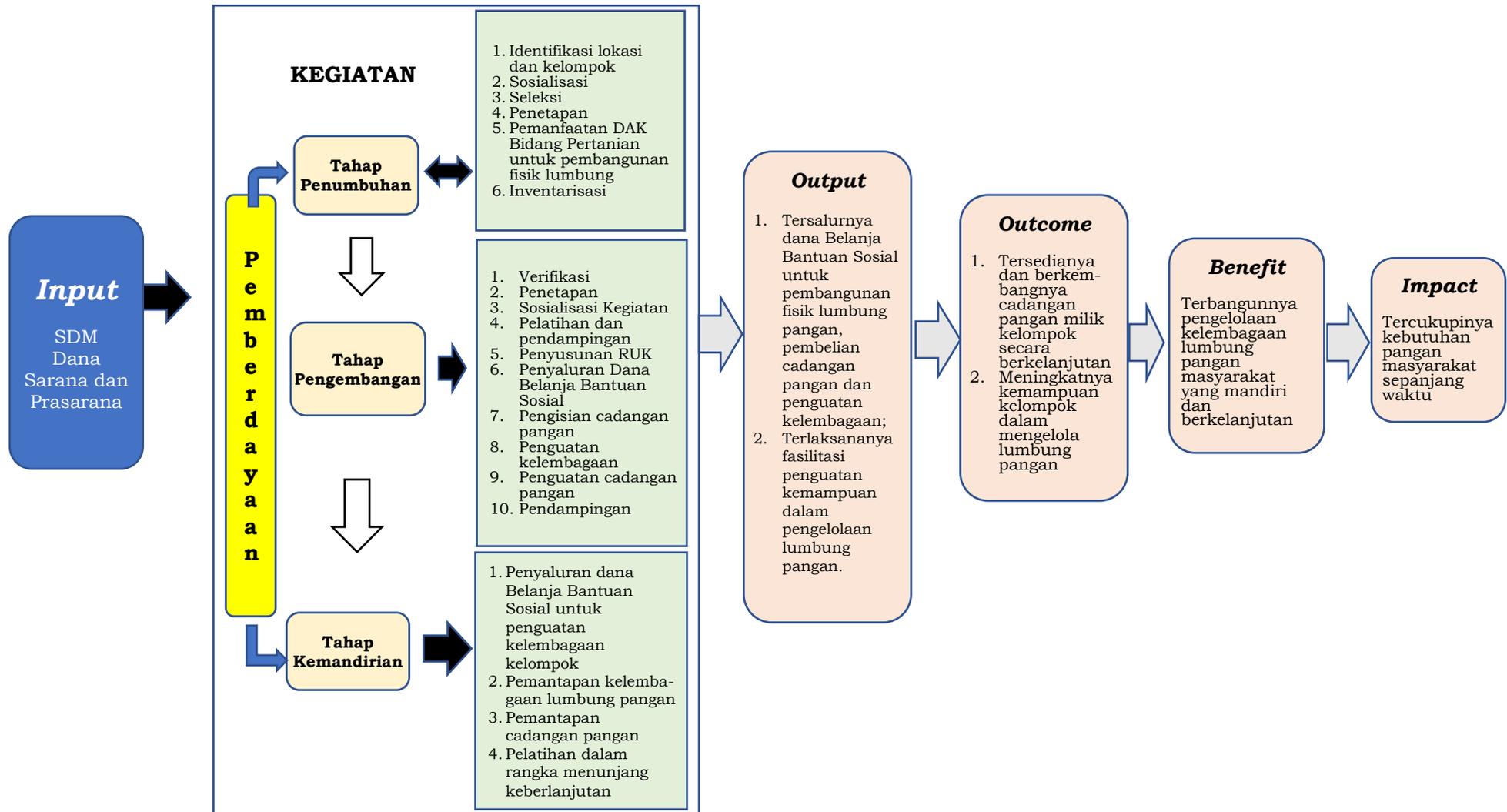
Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Sedangkan, Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

Cadangan pangan masyarakat dapat disimpan dalam lumbung pangan masyarakat (LPM). Lumbung Pangan adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan pangan lain untuk menghadapi masa paceklik. Kelompok Lumbung Pangan atau LPM adalah kelembagaan Cadangan Pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan Cadangan Pangan bagi masyarakat di suatu wilayah (Permentan 17/2015).

Pengembangan LPM berdasarkan Permentan 17/2015 terdiri dari tiga tahapan. Pertama **tahap penumbuhan**, kedua **tahap pengembangan**, dan ketiga **tahap kemandirian**, ilustrasi ketiga

tahapan tersebut dan masing-masing kegiatan dapat dilihat pada Gambar 2.1. Sedangkan pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara secara rinci dituangkan dalam Perda Nomor 2 tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

Berdasarkan uraian di atas, pada bagian berikut akan disajikan hasil kajian terhadap kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya melakukan perbaikan, peningkatan, dan penyempurnaan terhadap kinerja ketahanan pangan yang telah ada dan diimplementasikan selama ini. Khususnya yang berhubungan dengan program pembangunan lumbung pangan masyarakat (LPM) yang di laksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

III. METODE PENDEKATAN

3.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kajian Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara ini difokuskan pada upaya mencermati dan mengevaluasi program pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Kegiatan evaluasi mencakup aspek kondisi fisik bangunan lumbung, tata kelola dan pola kemitraan LPM, pola pembinaan dan pendam-pingan yang telah dilakukan oleh Instansi/Pemangku kepentingan. Lokasi Kajian meliputi delapan kecamatan, dengan satu lokus desa untuk masing-masing kecamatan sebagai sampel (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Lokus Kecamatan dan Kelurahan/Desa Sampel Pelaksanaan Program LPM di Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kecamatan	Desa	Keterangan
1	Anggana	SidoMulyo	Wilayah Pantai
2	Samboja	Karya Jaya	Wilayah Pantai
3	Marang Kayu	Sebuntal	Wilayah Pantai
4	Muara Jawa	Tama Pole	Wilayah Pantai
5	Tenggarong Seberang	Loa Lepu	Wilayah Tengah
6	Loa Kulu	Sumber Sari	Wilayah Tengah
7	Kota Bangun	Muhuran	Wilayah Hulu
8	Muara Kaman	Panca Jaya	Wilayah Hulu

3.2. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam kajian ini meliputi data primer dan data sekunder, jenis data dan prosedur pengumpulan data tersebut dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data sekunder dan informasi lain yang terkait dengan tema Kajian (program pembangunan dan pengelolaan LPM), diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah, utamanya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian dan Peternakan.

- 2) Pengumpulan data primer dari lapangan/kecamatan serta melakukan interview/wawancara dengan pengelola LPM serta PPL dan UPT Dinas Pertanian dan Peternakan.

3.3. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam kajian ini selanjutnya ditabulasi, dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan komparatif dengan menggunakan standar Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 17/Permetan/HK.140/4/2015. Untuk keperluan analisis, data dan informasi yang bersifat kualitatif dikuatifikasi dengan menggunakan sistem skoring dapat dilihat pada Tabel

Tabel 3.2. Indikator Tujuan untuk Mengetahui Kondisi LPM yang Dibangun Melalui Alokasi Pembiayaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Tujuan	Skor	Keterangan Skoring
1	Sumber Dana APBN	1	Rusak atau dialih fungsikan
		2	Kondisi baik tetapi tidak difungsikan
		3	Kondisi baik dan difungsikan sebagai lumbung
2	Sumber Dana APBD Provinsi	1	Rusak atau dialih fungsikan
		2	Kondisi baik tetapi tidak difungsikan
		3	Kondisi baik dan difungsikan sebagai lumbung
3	Sumber Dana APBD Kabupaten	1	Rusak atau dialih fungsikan
		2	Kondisi baik tetapi tidak difungsikan
		3	Kondisi baik dan difungsikan sebagai lumbung

Keterangan Skor: 1 = rendah atau kurang; 2 = sedang; 3 = tinggi atau baik.

Tabel 3.3. Indikator Tujuan untuk Mengetahui Tata Kelola/ Pengelolaan, Pola Kemitraan dan Permasalahan yang Dihadapi Dalam Memanfaatkan Keberadaan LPM

No	Indikator Tujuan	Skor	Keterangan Skoring
1	Tata Kelola/ pengelolaan LPM	1	Tidak memiliki SK pengurus LPM dan RUK
		2	Memiliki salah satu dari SK pengurus LPM atau RUK
		3	Memiliki kedua dokumen (SK dan RUK) tersebut
2	Pola kemitraan	1	Belum pernah mempunyai mitra pengelolaan LPM
		2	Memiliki mitra tetapi tidak aktif dalam Kerjasama
		3	Memiliki mitra dan aktif dalam pengembangan LPM
3	Permasalahan dalam pengelolaan LPM	1	Sangat banyak permasalahan yang harus dihadapi
		2	Menghadapi banyak masalah tetapi dapat diatasi
		3	Relatif tidak menghadapi masalah yang berat.

Keterangan Skor: 1 = rendah atau kurang; 2 = sedang; 3 = tinggi atau baik.

Tabel 3.4. Indikator Tujuan untuk Mengetahui Pola Pembinaan dan Pendampingan LPM yang Telah Dilakukan oleh Instansi Berwenang/Pemangku Kepentingan Lainnya.

No	Indikator Tujuan	Skor	Keterangan Skoring
1	Pembinaan dan pendampingan LPM	1	Tidak pernah ada pembinaan atau pendampingan dari manapun
		2	Pernah mendapat pembinaan dan pendampingan
		3	Mendapat pembinaan dan pendampingan secara rutin
2	Jumlah OPD atau para pihak yang pernah melakukan pembinaan/ pendampingan LPM	1	Tidak ada yang melakukan pendampingan/pembinaan
		2	Hanya satu OPD/para pihak yang pernah melakukan pembinaan/ pendampingan

No	Indikator Tujuan	Skor	Keterangan Skoring
		3	Dua atau lebih OPD/para pihak yang pernah melakukan pembinaan/pendampingan
3	Eksistensi LPM	1	Tidak diperlukan
		2	Diperlukan dengan pembinaan dan dukungan pengelolaan.
		3	Sangat diperlukan dan harus dikembangkan

Keterangan Skor: 1 = rendah atau kurang; 2 = sedang; 3 = tinggi atau baik.

IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH

Ketersediaan pangan merupakan satu dari tiga pilar ketahanan pangan utama, dan kegiatan produksi pangan pokok merupakan unsur utama dalam memenuhi ketersediaan pangan secara mandiri, mulai dari level nasional, daerah, hingga masyarakat di desa/kota. Berdasarkan kapasitas produksi pangan pokok tersebut dapat dinilai status cadangan pangan di suatu wilayah, termasuk kriteria surplus atau defisit.

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 yang mendekati 750.000 jiwa, berpedoman pada laporan BPS KALTIM (2022) bahwa penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 733.626 jiwa (Tabel 4.1). Bilamana tingkat konsumsi rata-rata diasumsikan 95 kg beras/kapita/tahun, maka kebutuhan beras untuk penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 mencapai 71.250 ton/tahun.

Tabel 4.1. Penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan distribusi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur (BPS KALTIM, 2022)

Kabupaten/Kota	Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk/Tahun	
	2020	2021	2010-2020	2020-2021
Kabupaten				
Paser	275.452	277.602	1,75	0,58
Kutai Barat	172.288	173.982	2,02	0,74
Kutai Kartanegara	729.382	733.626	1,48	0,44
Kutai Timur	434.459	449.161	5,27	2,53
Berau	248.035	252.648	3,20	1,39
Penajam Paser Utara	178.681	180.657	2,18	0,83
Mahakam Ulu	325.13	329.69	2,58	1,05
Kota				
Balikpapan	688.318	695.287	2,06	0,76
Samarinda	827.994	831.460	1,26	0,31
Bontang	178.917	180.843	2,15	0,81
Kalimantan Timur	3.766.039	3.808.235	2,13	0,84

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Produksi beras Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 mencapai 60.750 ton (Tabel 4.2) dari hasil panen padi sebanyak 104.442 ton GKG (Tabel 4.3) (BPS KALTIM, 2021). Berarti ketersediaan beras sebagai bahan pangan pokok di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 telah mengalami defisit sebesar 10.500 ton (14,74%). Berdasarkan data BPS KALTIM (2021) tersebut diketahui bahwa produksi beras Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 5,86% dibandingkan dengan tahun 2020. Kecenderungan penurunan produksi beras Kalimantan Timur tersebut terjadi di seluruh kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang. Tetapi kontribusi produksi beras Kota Bontang relatif sangat kecil.

Tabel 4.2. Produksi Beras Tahun 2020 dan 2021 Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (BPS KALTIM, 2021)

Kabupaten/Kota	Produksi Beras (Ton-Beras)			
	2020	2021	Perkembangan	
			Absolut	Relatif (%)
Paser	30.459,51	30.230,50	-229,01	-0,75
Kutai Barat	697,54	1.175,83	478,29	68,57
Kutai Kartanegara	64.530,52	60.750,49	-3.780,03	-5,86
Kutai Timur	9.934,06	7.631,26	-2.302,80	-23,18
Berau	13.583,55	13.008,91	-574,64	-4,23
Penajam Paser Utara	27.348,90	24.505,74	-2.843,16	-10,40
Mahakam Ulu	629,22	542,17	-87,05	-13,83
Balikpapan	244,05	205,99	-38,06	-15,60
Samarinda	5.032,37	4.065,23	-967,14	-19,22
Bontang	190,12	205,26	15,14	7,96
Kalimantan Timur	152.649,84	142.321,38	-10.328,46	-6,77

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Evaluasi tingkat produksi padi atau beras di masing-masing kecamatan yang menjadi tempat pembangunan LPM tidak dapat dilakukan, karena produksi padi tidak dilaporkan dalam Kutai Kartanegara dalam Angka sejak tahun 2020 (Kutai Kartanegara dalam Angka, 2020 dan 2021). Sehingga status ketersediaan cadangan pangan pokok dalam bentuk padi atau beras tidak dapat diketahui dalam hubungannya dengan pengelolaan LPM.

Tabel 4.3. Perkembangan Produksi Padi Tahun 2020 dan 2021 Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (BPS KALTIM, 2021)

Kabupaten/Kota	Produksi Padi (Ton-GKG)			
	2020	2021	Perkembangan	
			Absolut	Relatif (%)
Paser	52.365,75	51.972,06	-393,69	-0,75
Kutai Barat	1.199,22	2.021,46	822,24	68,56
Kutai Kartanegara	110.940,44	104.441,83	-6.498,61	-5,86
Kutai Timur	17.078,56	13.119,61	-3.958,95	-23,18
Berau	23.352,73	22.364,87	-987,86	-4,23
Penajam Paser Utara	47.018,03	42.130,12	-4.887,91	-10,40
Mahakam Ulu	1.081,75	932,09	-149,66	-13,83
Balikpapan	419,57	354,13	-65,44	-15,60
Samarinda	8.651,61	6.988,91	-1.662,70	-19,22
Bontang	326,86	352,88	26,02	7,96
Kalimantan Timur	262.434,52	244.677,96	-17.756,56	-6,77

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Berdasarkan kapasitas produksi padi, Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan berkontribusi 42,69% untuk produksi padi tingkat Kalimantan Timur. Secara absolut dampaknya sangat besar terhadap defisit ketersediaan konsumsi beras untuk level Provinsi Kalimantan Timur, yang pada tahun 2020 telah mencapai defisit sekitar 220.000 ton (Suyadi, 2021).

Gambaran luas panen padi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai sekitar 32.000 ha pada tahun 2020 (Tabel 4.4) sangat baik jika ditinjau dari aspek peningkatan IP (indeks pertanaman). Oleh karena, luas lahan baku sawah yang ditetapkan dalam SK Menteri ATR Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 yang hanya 36.399 ha untuk seluruh Kalimantan Timur, dan untuk Kutai Kartanegara luas sawahnya hanya 18.550 ha (Tabel 4.5). Data luas panen tersebut (Tabel 4.4) dapat menunjukkan bahwa telah banyak lahan sawah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditanami dua kali dalam satu tahun, sehingga IPnya mencapai >100 pada tahun 2020. Tetapi ada kemungkinan lain yang terjadi, luas panen tersebut merupakan gabungan antara luas panen padi sawah dan padi ladang, oleh karena laporan BPS dalam tiga tahun terakhir sudah tidak memisahkan antara luas panen padi sawah dan padi ladang. Sehingga rata-rata produktivitas tanaman padi di Kalimantan Timur yang dilaporkan BPS relatif rendah.

Tabel 4.4. Perkembangan Luas Panen Padi Tahun 2020 dan 2021 Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (BPS KALTIM, 2021)

Kabupaten/Kota	Luas Panen (ha)			
	2020	2021	Perubahan	
			Absolut	Relatif (%)
Paser	12.825,60	13.137,77	312.17	2,43
Kutai Barat	510,78	527,89	17.11	3,35
Kutai Kartanegara	31.952,96	27.635,02	-4317.94	-13,51
Kutai Timur	4.978,75	3.660,48	-1318.27	-26,48
Berau	6.461,68	5.756,54	-705.14	-10,91
Penajam Paser Utara	13.924,41	13.501,60	-422.81	-3,04
Mahakam Ulu	464,44	232,22	-232.22	-50,00
Balikpapan	118,31	102,67	-15.64	-13,22
Samarinda	2.250,75	1.632,33	-618.42	-27,48
Bontang	80,76	82,94	2.18	2,70

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Berdasarkan kondisi produksi padi seperti diuraikan di atas, maka upaya untuk memperkuat cadangan pangan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat perlu mendapat perhatian. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan dinyatakan pada Pasal 33:

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluasluasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Tabel 4.5. Luas Lahan Baku Sawah Kalimantan Timur (Sumber: SK Menteri ATR Nomor: 686/SK-PG.03.03/XII/2019).

No	Kabupaten/Kota	Luas GIS (ha)	Keterangan
1	Paser	2.750	
2	Kutai Barat	945	
3	Kutai Kartanegara	18.550	
4	Kutai Timur	1.730	
5	Berau	2.082	
6	Penajam Paser Utara	8.963	
7	Mahakam Ulu	-	Masih tergabung dengan Kutai Barat
8	Balikpapan	148	
9	Samarinda	1.183	
10	Bontang	49	
Total Kalimantan Timur		36.399	

Program LPM yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat relevan dalam mendukung pembangunan cadangan pangan di daerah ini. **Lumbung pangan adalah lembaga** yang dibentuk oleh masyarakat desa atau kota yang bertujuan sebagai *penyedia cadangan pangan* melalui kegiatan penyimpanan, pendistribusi-sian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara berkelompok (Permentan Nomor: 17/Permetan/HK.140/ 4/2015).

Lumbung pangan salah satu kelembagaan yang ada di masyarakat telah lama berperan dalam pengadaan pangan terutama dalam musim paceklik. Peranan lumbung di masa lalu lebih bersifat sosial dan sebagai tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan pangan di musim paceklik. Pengembangan konsep lumbung pangan masyarakat perlu dilakukan, sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 18 tersebut di atas. Pangan pokok tidak hanya terbatas pada padi atau beras, tetapi juga mencakup bahan pangan pokok lain yang mungkin dapat dikembangkan budidayanya di Kutai Kartanegara dalam upaya mewujudkan diversifikasi bahan pangan pokok.

Tabel 4.6. Jumlah dan Sebaran LPM di Kabupaten Kutai Kartanegara (Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kabupaten Kutai Kartanegara)

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah
1	Tenggarong (7 unit LPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Bendeng • Rapak Lambur • Maluhu • Mangkurawang • Bukit Biru 	<ul style="list-style-type: none"> 2 1 2 1 1
2	Tenggarong Seberang (2 unit LPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Bangun Rejo • Loa Lepu 	<ul style="list-style-type: none"> 1 1
3	Loa Kulu (2 unit LPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Sari • Merangan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 1
4	Loa Janan (1 unit LPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Tani Harapan 	<ul style="list-style-type: none"> 1
5	Muara Kaman (3 unit LPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Bunga Jadi (SP 5) • Panca Jaya (SP 4) • Sidomukti (SP 3) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 1 1
6	Kota Bangun (3 unit LPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Sari Nadi • Sumber Sari • Muhuran 	<ul style="list-style-type: none"> 1 1 1
7	Samboja (4 unit LPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Karya Jaya • Beringin Agung • Bukit Agung • Bukit Raya 	<ul style="list-style-type: none"> 1 1 1 1
8	Anggana (1 unit LPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Sidomulyo 	<ul style="list-style-type: none"> 1
9	Marangkayu	<ul style="list-style-type: none"> • Sebuntal 	<ul style="list-style-type: none"> 1
10	Muara Jawa	<ul style="list-style-type: none"> • Tama Pole 	<ul style="list-style-type: none"> 1
Jumlah Keseluruhan			25

Lumbungan pangan masyarakat (LPM) yang sudah dibangun Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 23 unit (Tabel 4.6), tersebar pada 8 kecamatan, yaitu Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Muara Kaman, Kota Bangun, Samboja dan Anggana. Jumlah LPM dibangun paling banyak terdapat di Kecamatan Tenggarong, yaitu sebanyak 7 LPM yang tersebar pada 5 kelurahan/desa. Umumnya tiap desa/kelurahan dibangun 1 LPM, namun pada beberapa desa/kelurahan ada yang dibangun 2 LMP.

V. KAJIAN DAN DISKUSI

Penyajian hasil kajian dan diskusi yang dilakukan mengacu pada pokok permasalahan yang dinyatakan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) “Kajian Kebijakan Ketahanan Pangan”. Adapun *Output* atau Keluaran dari kajian ini adalah berupa: **“Dokumen rekomendasi Kebijakan Ketahanan Pangan, khususnya yang terkait dengan Kebijakan dan Strategi Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat”**.

Berpedoman pada KAK tersebut, maka uraian hasil kajian dan diskusi yang disajikan untuk masing-masing lokus LPM difokuskan pada tiga tujuan kajian ini, yaitu: (1) **Untuk mengetahui kondisi LPM**, (2) **Untuk Mengetahui tata kelola/pengelolaan LPM, pola kemitraan dan permasalahan yang dihadapi dalam memanfaatkan LPM**, dan (3) **Untuk mengetahui pola pembinaan dan pendampingan LPM**, serta tujuan ke (4) yaitu **Menyusun rekomendasi perbaikan dan pengembangan program dan kegiatan** dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan, khususnya dalam hal pengelolaan lumbung pangan masyarakat (LPM) di Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa mendatang.

5.1. Hasil-hasil Kajian

Program pembangunan LPM mempunyai hubungan sangat erat dengan karakteristik wilayah dalam hubungannya dengan kegiatan budidaya tanaman padi sebagai komoditas tanaman pangan utama. Berdasarkan pertimbangan karakteristik wilayah tersebut, maka lokus kajian LPM ini di bagi menjadi tiga wilayah, yaitu: 1) wilayah pantai yang diwakili oleh Kecamatan Muara Jawa, Marang Kayu, Anggana dan Samboja, 2) wilayah tengah yang diwakili oleh Kecamatan Loa-Kulu dan Tenggarong Seberang, dan 3) wilayah hulu yang diwakili oleh Kecamatan Kota Bangun dan Muara Kaman.

5.1.1. Wilayah Pantai

1) Lokus LPM Kecamatan Kecamatan Marang Kayu

Rangkuman kuesioner dan wawancara dengan para pihak yang mengetahui program LPM di Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu adalah seperti tercantum dalam *Box 1*.

Box 1.

Deskripsi Singkat Hasil Kunjungan Lapangan

- Desa Sebuntal telah memiliki bangunan lumbung pangan. Lumbung pangan berupa gudang penyimpanan gabah, tanpa lantai jemur. Lumbung tidak dilengkapi oleh pintu.
- Ukuran lumbung 3x4 meter dengan kapasitas 5 ton.
- Lumbung di Desa Sebuntal merupakan bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu.
- Pembangunan lumbung berasal dari dana bantuan Badan Ketahanan Pangan yang dikerjakan swadaya oleh masyarakat.
- Badan Ketahanan Pangan juga memberikan bantuan gabah. Gabah tersebut digunakan oleh petani sebanyak dua (2) kali masa tanam. Gabah yang telah digunakan oleh petani, tidak dikembalikan.
- Akses menuju lumbung hanya bisa dilalui oleh sepeda motor.
- Dana operasional lumbung dapat berasal dari anggaran dana desa.
- Desa Sebuntal belum memiliki kepengurusan dan peraturan pengelolaan lumbung pangan.
- Lantai jemur yang terdapat di Desa Sebuntal terbatas.
- Jaringan irigasi dan drainase di Desa Sebuntal belum optimal.
- Desa Sebuntal memiliki petani penangkar benih dan lumbung milik pribadi penangkar.

Secara terinci hasil wawancara dengan responden yang mewakili para pihak yang mengetahui tentang program LPM di wilayah Kecamatan Marang Kayu, setelah melalui proses skoring, disajikan dalam Tabel 5.1. Ditinjau secara fisik, bangunan lumbung yang ada sudah tidak layak difungsikan sebagai lumbung padi. Demikian pula ditinjau dari aspek pengelolaan, LPM di Desa Sebuntal belum mempunyai pengurus definitif, belum juga memiliki ADART, RUK (rencana usaha kelompok). Sehingga adanya bantuan dari pemerintah, seperti bantuan gabah tidak dapat dikelola dengan baik

dan dikembangkan menjadi modal pengelolaan LPM. Kegiatan pendampingan dan pembinaan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan LPM relatif sangat banyak, dan tidak dapat diatasi dengan baik, karena belum memiliki pengurus definitif dan aturan pengelolaannya.

Tabel 5.1. Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Tujuan	Responden							Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	6	7		
1.1	Sumber dana APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Sumber dana APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Sumber dana APBD Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.1	Tata Kelola/ pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.2	Pola kemitraan	1	1	1	1	2	1	1	8	1,14
2.3	Permasalahan dalam pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.1	Pembinaan dan pendampingan LPM	1	1	2	1	1	1	1	8	1,14
3.2	Jumlah OPD atau para pihak yang melakukan pembinaan	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.3	Esistensi LPM	1	1	1	2	2	1	1	9	1,29
Total									53	1,08

Keterangan Skor: 1 = rendah atau kurang; 2 = sedang; 3 = tinggi atau baik.

Secara umum keberadaan LPM di Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu sudah tidak berfungsi, dengan total skor rata-rata rendah atau kurang (1,08). Indikator tujuan yang mempunyai skor tertinggi (meskipun hanya 1,29) adalah harapan atau keinginan tetap adanya program lumbung pangan di Desa Sebuntal. Harapan tersebut didukung oleh adanya peluang penggunaan dana desa untuk operasional LPM, dan adanya sosialisasi program.

2) Lokus LPM Kecamatan Muara Jawa

Rangkuman kuesioner dan wawancara dengan para pihak yang mengetahui program LPM di Desa Tama Pole, Kecamatan Muara Jawa adalah seperti tercantum dalam *Box 2*.

Box 2.
Deskripsi Singkat Hasil Kunjungan Lapangan

- Desa Tama Pole telah memiliki bangunan lumbung pangan.
- Kegiatan lumbung pangan tidak berjalan (vakum) dan lumbung tidak terisi.
- Kepengurusan lumbung pangan belum ada.
- Peraturan lumbung belum terbentuk.
- Dana pembangunan lumbung berasal dari bantuan Badan Ketahanan Pangan.
- Dana operasional lumbung dapat berasal dari Anggaran Kelurahan.
- Kepengurusan lumbung dapat melibatkan kelompok tani dan gapoktan Desa Tama Pole.
- Pengisian lumbung terhambat dikarenakan rendahnya produksi lahan sawah.
- Hambatan budidaya padi di Desa Tama Pole adalah pH tanah dan air tanah yang rendah (asam), jaringan drainase tidak tersedia. Hal ini mengakibatkan proses pencucian tanah terhambat,
- Sawah di Desa Tama Pole diolah atau digarap oleh petani desa lain.
- Keterbatasan petani yang berdomisili di Desa Tama Pole mengakibatkan kesulitan pembentukan kepengurusan lumbung.
- Pendampingan terhadap gapoktan dan kelompok tani terkait pengelolaan lumbung pangan perlu dilakukan.
- Desa Tama Pole sebagian besar merupakan lahan sawah/ladang.

Secara terinci hasil wawancara dengan responden yang mewakili para pihak yang mengetahui tentang program LPM di wilayah Kecamatan Muara Jawa, setelah melalui proses skoring, disajikan dalam Tabel 5.2. Ditinjau dari bangunan fisik lumbung kondisinya masih baik, tetapi tidak berfungsi sebagai lumbung. Pengelolaan LPM tidak berjalan, karena belum memiliki pengurus yang definitif. Sehingga berdampak pada belum tersusunnya ADART, RUK, dan prosedur operasional standar (POS) untuk pengelolaan LPM.

Tabel 5.2. Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Kelurahan Tama Pole, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Tujuan	Responden							Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	6	7		
1.1	Sumber dana APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Sumber dana APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Sumber dana APBD Kabupaten	2	2	1	2	1	1	2	11	1,57
2.1	Tata Kelola/ pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.2	Pola kemitraan	1	1	1	1	2	1	1	8	1,14
2.3	Permasalahan dalam pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.1	Pembinaan dan pendampingan LPM	2	1	2	1	1	1	1	9	1,29
3.2	Jumlah OPD atau para pihak yang melakukan pembinaan	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.3	Esistensi LPM	2	1	2	1	2	1	1	10	1,43
Total									59	1,20

Keterangan Skor: 1 = rendah atau kurang; 2 = sedang; 3 = tinggi atau baik.

Demikian pula ditinjau dari aspek aspek pembinaan dan pendampingan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Namun warga masih mengharapkan penumbuhan LPM agar dapat berfungsi dengan baik, sehingga dapat menyiapkan cadangan pangan bagi masyarakat di Kecamatan Muara Jawa.

3) Lokus LPM Kecamatan Anggana

Rangkuman kuesioner dan wawancara dengan para pihak yang mengetahui program LPM di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana adalah seperti tercantum dalam Box 3.

Box 3.**Deskripsi Singkat Hasil Kunjungan Lapangan**

- Lumbung pangan di Desa Sidomulyo termasuk dalam bangunan permanen. Lumbung tersebut dilengkapi dengan lantai jemur, ruang penggilingan dan gudang penyimpanan gabah.
- Mesin penggilingan belum tersedia.
- Kegiatan lumbung pangan tidak berjalan (vakum). Lumbung tidak terisi gabah.
- Lahan yang digunakan sebagai lumbung pangan dahulunya merupakan lahan rawa.
- Pembangunan lumbung pangan berasal dari dana bantuan Dinas Ketahanan Pangan.
- Dana operasional lumbung dapat berasal dari ADD yang telah disepakati dalam musrembang.
- Pengelolaan lumbung dapat melibatkan gapoktan dan kelompok tani Desa Sidomulyo.
- Lumbung pangan belum memiliki kepengurusan. Pengurus lumbung dapat melibatkan perwakilan Kelompok tani di Desa Sidomulyo.
- Belum adanya peraturan yang baku dalam pengelolaan lumbung pangan.
- Petani Desa Sidomulyo belum mengerti pentingnya keberadaan lumbung pangan.
- Gapoktan Desa Sidomulyo telah memiliki Mesin pertanian berupa bajak, hand traktor dan penggilingan mobile.
- Gapoktan Desa Sidomulyo saat ini sedang melakukan kerjasama penanaman (demplot) dengan dinas pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 20 ha.

Secara terinci hasil wawancara dengan responden yang mewakili para pihak yang mengetahui tentang program LPM di wilayah Kecamatan Anggana, setelah melalui proses skoring, disajikan dalam Tabel 5.3. Secara umum pembangunan LPM di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana belum berhasil dengan total skor rata-rata relatif masih rendah (1,39).

Tabel 5.3. Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Tujuan	Responden							Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	6	7		
1.1	Sumber dana APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Sumber dana APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Sumber dana APBD Kabupaten	2	2	2	2	2	2	2	14	2,00
2.1	Tata Kelola/ pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.2	Pola kemitraan	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.3	Permasalahan dalam pengelolaan LPM	2	1	1	1	1	1	1	8	1,14
3.1	Pembinaan dan pendampingan LPM	2	2	1	1	2	1	2	11	1,57
3.2	Jumlah OPD atau para pihak yang melakukan pembinaan	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.3	Esistensi LPM	2	2	2	2	2	2	2	14	2,00
Total									68	1,39

Keterangan Skor: 1 = rendah atau kurang; 2 = sedang; 3 = tinggi atau baik.

Kondisi bangunan fisik lumbung masih baik, tetapi tidak berfungsi sebagai LPM seperti harapan. Pengelolaan tidak berjalan karena belum memiliki pengurus yang definitif, sehingga belum tersusun ADART, RUK, maupun POS. Dampak lain dengan ketiadaan pengurus definitif, permasalahan yang dihadapi relatif banyak. Sedangkan pendampingan dan pembinaan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Namun masyarakat di Desa Sidomulyo masih berharap LPM dapat ditumbuhkan dan dapat berfungsi dengan baik dapat agar bermanfaat bagi petani dan masyarakat desa pada umumnya.

4) Lokus LPM Kecamatan Samboja.

Rangkuman kuesioner dan wawancara dengan para pihak yang mengetahui program LPM di Desa Karya Jaya, Kecamatan Samboja adalah seperti tercantum dalam Box 4.

Box 4.**Deskripsi Singkat Hasil Kunjungan Lapangan**

- Camat Samboja belum menerima informasi atau laporan terkait lumbung pangan masyarakat (LPM).
- Luas lahan sawah di Kecamatan Samboja adalah 200 ha.
- Penanaman padi di Desa Karya Jaya sebanyak 2 kali setahun dengan menggunakan air irigasi waduk Samboja.
- Lumbung pangan di Desa Karya Jaya yang letaknya jauh dan kurang efisien, dikarenakan petani lebih memilih menyimpan gabahnya di rumah.
- Pengurus lumbung pangan tidak terlalu aktif, dikarenakan tidak adanya insentif dalam mengelola lumbung.
- Lumbung Pangan di Desa Karya Jaya dibangun sekitar tahun 2015.
- Pengurus lumbung mengundurkan diri dikarenakan sakit.
- Lumbung pangan dibangun menggunakan dana bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan.
- Lumbung tersebut diisi gabah yang merupakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kertanegara.
- Kondisi lumbung tidak steril, hanya bisa digunakan sekitar 20-30 persen.
- Bangunan lumbung merupakan bangunan permanen.
- Keterbatasan SDM yang menjadi Petani di Desa Karya Jaya.
- Petani dari luar Desa Karya Jaya banyak yang mengolah lahan sawah.
- Kawasan Desa Karya Jaya sebagian besar masuk dalam Kawasan Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto.
- Produktivitas lahan sawah di Desa Karya Jaya termasuk rendah, dikarenakan pH air tanah dan tanah rendah (masam) dan lapisan gambut yang tebal.
- Saluran drainase juga tidak tersedia, sehingga proses pencucian tanah tidak berlangsung optimal.
- Pengelolaan lumbung pangan dapat melibatkan perwakilan kelompok tani.
- Biaya operasional lumbung dapat menggunakan ADD dan melakukan kerjasama dengan Bumdes.

Secara terinci hasil wawancara dengan responden yang mewakili para pihak yang mengetahui tentang program LPM di wilayah Kecamatan Samboja, setelah melalui proses skoring, disajikan dalam Tabel 5.4. Secara umum program LPM di Desa Karya Jaya, Kecamatan Samboja belum berhasil dan kondisinya cukup memprihatinkan dengan total skor rata-rata relatif masih rendah (1,06).

Tabel 5.4. Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Desa Karya Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Tujuan	Responden							Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	6	7		
1.1	Sumber dana APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Sumber dana APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Sumber dana APBD Kabupaten	1	1	2	1	1	1	1	8	1,14
2.1	Tata Kelola/ pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.2	Pola kemitraan	1	1	1	2	1	1	1	8	1,14
2.3	Permasalahan dalam pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.1	Pembinaan dan pendampingan LPM	1	1	2	1	1	1	1	8	1,14
3.2	Jumlah OPD atau para pihak yang melakukan pembinaan	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.3	Esistensi LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
Total									52	1,06

Keterangan Skor: 1 = rendah atau kurang; 2 = sedang; 3 = tinggi atau baik

Kondisi bangunan fisik lumbung tidak terawat, dan tidak difungsikan sebagai LPM. Demikian pula pengelolaannya belum/tidak berjalan, karena tidak memiliki pengurus definitif. Pembinaan atau pendampingannya juga belum terlaksana sebagaimana seharusnya. Masyarakat di desa ini juga kurang antusias terhadap program LPM, karena banyak petani yang menanam padi di Desa Karya Jaya berasal dari luar desa.

5.1.2. Wilayah Tengah

1) Lokus LPM Kecamatan Loa-Kulu

Rangkuman kuesioner dan wawancara dengan para pihak yang mengetahui program LPM di Desa Karya Jaya, Kecamatan Loa-Kulu adalah seperti tercantum dalam Box 5.

Box 5**Deskripsi Singkat Hasil Kunjungan Lapangan**

- Kecamatan Loa Kulu memiliki dua lumbung pangan, yaitu di Desa Sumber Sari dan Desa Margahayu (Proses Pembangunan).
- Lumbung pangan dibangun pada tahun 2015.
- Lumbung Pangan di Desa Sumber Sari merupakan bangunan permanen berukuran 8 x 10 meter, tanpa lantai jemur. Kapasitas 25 ton.
- Pembangunan lumbung pangan di Desa Sumber Sari berasal dari bantuan badan ketahanan pangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Bantuan gabah diberikan oleh Badan Ketahanan pangan sebesar 3 ton. Gabah tersebut merupakan gabah konsumsi tetapi kualitasnya kurang bagus.
- Lumbung pangan di Desa Sumber Sari telah memiliki pengurus dan ADART.
- Lumbung pangan melayani simpan pinjam gabah anggota kelompok dan luar kelompok. Ketentuan peminjaman gabah, tiap 10 kilo gabah akan dikembalikan sebanyak 12 kg gabah.
- Lumbung pangan juga melayani simpan pinjam uang bagi anggota kelompok dan luar anggota kelompok. Ketentuan peminjaman uang, tiap 1 jt rupiah yang dipinjam akan dikembalikan sebanyak 1.050.000 (dalam 3 bulan).
- Penanaman padi di Desa Sumber Sari dilakukan dua kali setahun.
- Umur simpan gabah di lumbung pangan termasuk pendek, dikarenakan lumbung tidak memiliki lantai jemur.
- Gabah yang telah melewati umur simpan akan langsung dijual.
- Gabah di lumbung dijual langsung ke tengkulak.
- Petani mengalami kesulitan dalam penjualan gabah saat memasuki musim panen

Secara terinci hasil wawancara dengan responden yang mewakili para pihak yang mengetahui tentang program LPM di wilayah Kecamatan Loa-Kulu, setelah melalui proses skoring, disajikan dalam Tabel 5.5. Secara umum pembangunan LPM di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa-Kulu relatif berfungsi meskipun masih dalam kriteria rendah, dengan total skor rata-rata 1,55 (kriteria rendah menuju sedang).

Tabel 5.5. Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa-Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Tujuan	Responden							Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	6	7		
1.1	Sumber dana APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Sumber dana APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Sumber dana APBD Kabupaten	3	3	3	2	2	1	1	15	2,14
2.1	Tata Kelola/ pengelolaan LPM	2	2	2	2	2	1	1	12	1,71
2.2	Pola kemitraan	1	1	1	2	1	1	1	8	1,14
2.3	Permasalahan dalam pengelolaan LPM	1	1	2	2	1	1	1	9	1,29
3.1	Pembinaan dan pendampingan LPM	1	1	2	2	1	1	1	9	1,29
3.2	Jumlah OPD atau para pihak yang melakukan pembinaan	1	1	2	1	1	1	1	8	1,14
3.3	Esistensi LPM	2	2	2	2	2	1	1	12	1,71
Total									73	1,55

Keterangan Skor: 1 = rendah atau kurang; 2 = sedang; 3 = tinggi atau baik

Kondisi fisik bangunan lumbung dalam keadaan baik dan berfungsi meskipun belum optimal. Pengelolaan LPM sudah berjalan dan memiliki pengurus definitif. LPM telah memiliki ADART dan regulasi atau aturan pemanfaat gabah baik oleh anggota maupun non-anggota LPM. Modal LPM yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tidak hanya dalam bentuk padi, tetapi dapat juga dalam bentuk uang. Masyarakat di Desa Sumber Sari setuju untuk pengembangan LPM, agar dapat berfungsi lebih baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat lebih luas. Pengurus LPM sangat mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah untuk pembangunan lantai jemur, yang akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan fungsi LPM.

2) Lokus LPM Kecamatan Tenggarong Seberang

Rangkuman kuesioner dan wawancara dengan para pihak yang mengetahui program LPM di Desa Loa-Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang adalah seperti tercantum dalam Box 6.

Box 6.
Deskripsi Singkat Hasil Kunjungan Lapangan

- Kecamatan Tenggarong Seberang di tahun 2023 direncanakan akan membangun 3 lumbung pangan di Desa Buana Jaya, Loa Raya dan Sukamaju.
- Peran Kecamatan dalam pembangunan lumbung pangan adalah memberikan pendampingan dalam pembuatan proposal bantuan yang akan diserahkan ke Dinas Pertanian.
- Desa Loa-Lepu telah memiliki bangunan lumbung pangan, didirikan pada tahun 2013 dari dana bantuan Dinas Ketahanan Pangan.
- Bantuan gabah di berikan oleh Dinas Ketahanan Pangan.
- Bantuan gabah yang diberikan kemudian dijual oleh pengurus dikarenakan kualitas yang kurang baik. Hasil dari penjualan gabah kemudian digunakan sebagai modal lumbung.
- Bangunan lumbung tidak steril untuk penyimpanan gabah dikarenakan adanya ventilasi yang rusak dan lantai lumbung yang berlubang akibat tikus.
- Lumbung dialihfungsikan sebagai balai pertemuan oleh masyarakat Desa Loa-Lepu.
- Lumbung pangan saat ini vakum, tidak adanya kegiatan pengisian gabah.
- Kepengurusan lumbung pangan juga tidak jelas.
- Petani di Desa Loa-Lepu sebagian besar beralih ketanaman hortikultura dikarenakan lebih menguntungkan. Tersisa 30% petani yang menanam padi.
- Kepengurusan lumbung diharapkan melibatkan perwakilan dari kelompok tani di Desa Loa-Lepu.
- Peraturan peminjaman gabah atau uang tidak jelas. Hal ini menyebabkan banyaknya kredit macet, sehingga mempengaruhi modal yang dimiliki lumbung.

Secara terinci hasil wawancara dengan responden yang mewakili para pihak yang mengetahui tentang program LPM di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang, setelah melalui proses skoring, disajikan dalam Tabel 5.6. Secara umum LPM di Desa Loa-Lepu tidak berfungsi dengan total skor rata-rata hanya 1,02 (kriteria rendah).

Tabel 5.6. Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Desa Loa-Lepu, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Tujuan	Responden							Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	6	7		
1.1	Sumber dana APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Sumber dana APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Sumber dana APBD Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.1	Tata Kelola/ pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.2	Pola kemitraan	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.3	Permasalahan dalam pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.1	Pembinaan dan pendampingan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.2	Jumlah OPD atau para pihak yang melakukan pembinaan	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.3	Esistensi LPM	1	1	1	1	2	1	1	8	1,14
Total									50	1,02

Keterangan Skor: 1 = rendah atau kurang; 2 = sedang; 3 = tinggi atau baik.

Kecamatan Tenggara Seberang sebagai sentra utama produksi padi di Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan membangun LPM sebanyak tiga unit pada tahun 2023 mendatang, dan akan diletakkan di Desa Buana Jaya, Loa-Raya, dan Sukamaju.

Sedangkan LPM yang sudah ada pada saat ini yang berlokasi di Desa Loa-Lepu relatif tidak berfungsi. Ditinjau dari bangunan fisik lumbung sudah dialih fungsikan sebagai Balai Pertemuan. Demikian pula pengelolaannya tidak berjalan karena tidak memiliki pengurus yang definitif, dan pembinaan atau pendampingan LPM oleh para pihak tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Alasan yang disampaikan oleh responden, tidak berkembangnya LPM di Desa Loa-Lepu ini karena sebagian besar petaninya beralih mengembangkan tanaman hortikultura yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan budidaya tanaman padi.

5.1.3. Wilayah Hulu

1) Lokus LPM Kecamatan Kota Bangun

Rangkuman kuesioner dan wawancara dengan para pihak yang mengetahui program LPM di Desa Muhuran, Kecamatan Kota Bangun adalah seperti tercantum dalam Box 7.

Box 7.

Deskripsi Singkat Hasil Kunjungan Lapangan

- Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Muhuran berasal dari dana Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Lumbung Pangan Masyarakat pernah ada di Desa Muhuran. Kondisi saat ini LPM tersebut tidak digunakan oleh masyarakat, dikarenakan desain LPM (ketinggian bangunan) yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
- Lokasi di sekitar lumbung pangan masyarakat sering mengalami banjir, sehingga gabah yang disimpan akan terendam banjir.
- Masyarakat menyimpan gabah di rumah. Hal ini bertujuan mempercepat dan mempermudah dalam proses penjualan gabah. Pembeli gabah dapat langsung menghubungi petani untuk memenuhi kebutuhan gabahnya.
- Letak sawah di Desa Muhuran terletak di kawasan pasang surut. Pada saat pelaksanaan survey, petani sedang melaksanakan panen.
- Mata pencarian masyarakat Desa Muhuran berupa petani (musim kering), dan nelayan (musim hujan).
- Lama banjir yang terjadi sekitar 4-5 bulan.
- Petani mengalami kesulitan dalam mengakses pupuk.
- Petani menerima bantuan mesin pemanen serta perontok gabah yang berasal dari Dinas Pertanian Provinsi.

Secara terinci hasil wawancara dengan responden yang mewakili para pihak yang mengetahui tentang program LPM di wilayah Kecamatan Kota Bangun, setelah melalui proses skoring, disajikan dalam Tabel 5.7. Secara umum LPM di Desa Muhuran tidak berfungsi, dengan total skor rata-rata hanya 1,08 (kriteria rendah)

Tabel 5.7. Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Desa Muhuran, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Tujuan	Responden						Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	6		
1.1	Sumber dana APBN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Sumber dana APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Sumber dana APBD Kabupaten	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.1	Tata Kelola/ pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.2	Pola kemitraan	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.3	Permasalahan dalam pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.1	Pembinaan dan pendampingan LPM	1	1	2	2	1	1	9	1,29
3.2	Jumlah OPD atau para pihak yang melakukan pembinaan	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.3	Esistensi LPM	1	1	1	1	1	2	9	1,29
Total								53	1,08

Keterangan Skor: 1 = rendah atau kurang; 2 = sedang; 3 = tinggi atau baik.

Kondisi fisik bangunan lumbung tidak terawat, karena sering mengalami banjir dengan periode sekitar 4-5 bulan dalam setahun. Pengelolaan LPM tidak berjalan karena tidak memiliki pengurus yang definitif. Demikian pula kegiatan pembinaan dan pendampingan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Masyarakat lebih senang menyimpan padi di rumahnya masing-masing, karena lebih mudah melakukan pengamanan dari resiko banjir dan memudahkan kegiatan penjualan padi.

2) Lokus LPM Kecamatan Muara Kaman

Rangkuman kuesioner dan wawancara dengan para pihak yang mengetahui program LPM di Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman adalah seperti tercantum dalam Box 8.

Box 8**Deskripsi Singkat Hasil Kunjungan Lapangan**

- Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Panca Jaya dibangun oleh bantuan dana Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Lumbung Pangan Masyarakat dahulu pernah ada (sebelum pandemi covid), saat ini lumbung sudah tidak berjalan (vakum).
- Lantai jemur dapat digunakan oleh masyarakat desa.
- Akses jalan menuju LPM sempit. Mobil akan mengalami kesulitan untuk masuk ke LPM.
- Lantai jemur terbuat dari semen, ketinggian lantai jemur kurang tinggi jika dibandingkan dengan tepi lantai jemur. Desain lantai jemur tidak sesuai kebutuhan penjemuran. Terdapat pembatas (batubata) dipinggir lantai jemur. Belum adanya pagar pembatas LPM.
- Kondisi ventilasi LPM di Desa Panca Jaya banyak terdapat lubang. Kondisi atap LPM di Desa Panca Jaya banyak terdapat kebocoran.
- Adanya penggilingan (individu) di dekat (sebelah) LPM.
- Pengelolaan LPM di Desa Panca Jaya kurang efisien, dikarenakan tidak adanya partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak disiplin dalam mengembalikan dana yang dipinjam dari LPM.
- Belum adanya peraturan yang disepakati oleh masyarakat dalam pengelolaan LPM.
- Gabah yang bersal dari Desa Panca Jaya diupayakan oleh BPD dapat beredar di desa itu sendiri. Hal ini bertujuan agar ekonomi masyarakat dapat berputar.
- Saat LPM beroperasi, gabah petani akan memenuhi lumbung. Tetapi petani mengalami kesulitan dalam melakukan penggilingan.
- Mesin penggiling dan pengemasan belum tersedia di LPM Desa Panca Jaya

Secara terinci hasil wawancara dengan responden yang mewakili para pihak yang mengetahui tentang program LPM di wilayah Kecamatan Muara Kaman, setelah melalui proses skoring, disajikan dalam Tabel 5.8. Secara umum LPM di Desa Panca Jaya tidak berfungsi dengan total skor rata-rata 1,24 (kriteria rendah).

Tabel 5.8. Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Desa Panca Jaya, Kecamatan Kota Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Tujuan	Responden							Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	6	7		
1.1	Sumber dana APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Sumber dana APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Sumber dana APBD Kabupaten	1	1	2	1	2	1	1	9	1,29
2.1	Tata Kelola/ pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.2	Pola kemitraan	1	1	1	2	1	1	1	8	1,14
2.3	Permasalahan dalam pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.1	Pembinaan dan pendampingan LPM	3	1	3	1	2	1	1	12	1,71
3.2	Jumlah OPD atau para pihak yang melakukan pembinaan	2	1	1	1	1	1	1	8	1,14
3.3	Esistensi LPM	1	1	1	2	2	2	1	10	1,43
Total									61	1,24

Keterangan Skor: 1 = rendah atau kurang; 2 = sedang; 3 = tinggi atau baik.

Pada awalnya LPM sempat berfungsi, tetapi kemudian vacum sejak terjadi kasus covid-19. Kondisi fisik bangunan lumbung mengalami kerusakan, terutama bagian atap sudah mengalami kebocoran. Pengelolaan LPM belum berjalan, kepengurusan masih tidak jelas, belum memiliki ADART dan RUK. Pendampingan dan pembinaan yang rutin hanya dilakukan oleh PPL. Kegiatan LPM diupayakan oleh BPD untuk memenuhi kebutuhan padi atau beras untuk desa sendiri, agar ekonomi masyarakat dapat berputar.

Beras produksi Kecamatan Muara Kaman sudah ada yang dikemas ber logo dan dipasarkan sampai ke Samarinda dan Balikpapan. Pemerintah desa mendukung pengembangan LPM agar berfungsi dengan baik, misalnya dengan menggunakan ADD untuk biaya operasional LPM.

5.2. Diskusi

Berdasarkan data dan informasi yang telah diuraikan dalam kajian di atas, dapat diketahui gambaran tentang kondisi fisik bangunan lumbung, status pengelolaan LPM, dan kegiatan pendampingan atau pembinaan yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan.

Ditinjau dari aspek kondisi fisik bangunan LPM, berdasarkan delapan sampel lumbung yang diobservasi terdapat satu unit lumbung yang telah dialih fungsikan (di Desa Loa-Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang), ada yang telah mengalami kerusakan (di Desa Sebuntal – Kecamatan Marang Kayu, Desa Karya Jaya – Kecamatan Samboja, Desa Muhuran – Kecamatan Kota Bangun, dan Desa Panca Jaya – Kecamatan Muara Kaman), dan ada yang masih dalam kondisi baik (di Desa Tama Pole – Kecamatan Muara Jawa, Desa Sidomulyo – Kecamatan Anggana, dan Desa Sumber Sari – Kecamatan Loa-Kulu).

Berdasarkan kunjungan lapangan di delapan lokus program LPM, diketahui ada satu bangunan lumbung yang telah dialih fungsikan, empat bangunan lumbung dalam kondisi rusak berat dan ringan, dan tiga bangunan lumbung dalam kondisi baik. Bangunan lumbung yang telah dilengkapi dengan lantai jemur hanya terdapat di dua lokus, yaitu Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana, dan Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman.

Ditinjau dari aspek tata kelola/pengelolaan LPM, pada umumnya LPM yang diobservasi belum dikelola dengan baik, kecuali untuk LPM Desa Sumber Sari di Kecamatan Loa-Kulu. Pengelolaan LPM belum atau tidak memiliki kepengurusan yang definitif, kondisi demikian berdampak pada tidak tersusunnya RUK (rencana usaha kelompok), ADART, ataupun POS (prosedur operasional standar) untuk pengelolaan LPM. Sehingga pengembangan LPM sulit dilakukan, terutama untuk melakukan kemitraan dengan para

pihak, dan banyak menimbulkan permasalahan yang tidak dapat dipecahkan.

Kondisi pengelolaan LPM seperti diuraikan di atas, berkaitan erat dengan terbatasnya kegiatan pembinaan dan pendampingan oleh OPD yang berwenang. Oleh karena program LPM ini pada dasarnya merupakan program yang bersifat “*top-down*”, maka kesiapan penerimaan masyarakat sangat variatif. Kultur masyarakat petani kita dalam menerima program yang bersifat “*top-down*” masih sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah, termasuk dalam bentuk kegiatan pembinaan dan pendampingan. Bilamana kegiatan pembinaan dan pendampingan tidak dilakukan secara intensif, sangat sulit program tersebut dapat berjalan dengan baik.

Permentan 17 Tahun 2015 merupakan rujukan utama dalam Pengembangan LPM, dan diskusi hasil kajian terhadap delapan sampel LPM di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diobservasi dapat menggunakan indikator **tujuan** dan **penilaian capaian program LPM** sebagai berikut.

Tujuan Permentan 17/2015

- 1) meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan;
- 2) meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan; dan
- 3) meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan data dan informasi yang dapat dikumpulkan dalam kajian ini, diketahui bahwa kegiatan pendampingan dan pembinaan LPM tidak berjalan seperti yang diharapkan (skor indikator tujuan 3.1 dan 3.2) selalu rendah. Sehingga kemampuan pengurus LPM tidak meningkat (skor indikator tujuan 2.1, 2.2, dan 2.3) selalu rendah untuk semua lokus observasi. Dampaknya, pengelolaan LPM tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan, karena tidak memiliki RUK, ADART, POS, dan pengurus yang definitif. Jadi berdasarkan indikator tujuan dalam Permentan 17 Tahun 2015 tersebut, program LPM di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikatakan tidak/belum berhasil. Sehingga

perlu dilakukan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatannya, untuk dinaikan dari tingkat saat ini (penumbuhan) ke tingkat pengembangan LPM, dan selanjutnya menjadi kemandirian LPM.

Penilaian pelaksanaan program LPM dapat menggunakan indikator:

Output, Outcome, Benefit, dan **Impact.** Berdasarkan data dan informasi yang dapat dikumpulkan dari hasil observasi, hanya *indikator output* 1) yang disampaikan oleh para responden, dan pemanfaatannya juga tidak terkelola dengan baik. Karena LPM belum memiliki aturan atau SOP dalam pengelolaan dana Bantuan Sosial tersebut, dan justru menimbulkan banyak permasalahan yang tidak dapat terpecahkan. Sedangkan untuk indikator yang lainnya belum dapat dievaluasi.

Penilaian Program LPM

Indikator Output

- 1) tersalurnya Dana Belanja Bantuan Sosial untuk pembelian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok; dan
- 2) terlaksananya fasilitasi peningkatan kemampuan dalam pengelolaan lumbung pangan.

Indikator Outcome

- 1) tersedianya dan berkembangnya cadangan pangan milik kelompok secara berkelanjutan; dan
- 2) meningkatnya kemampuan kelompok dalam pengelolaan lumbung pangan.

Indikator Benefit

Terbangunnya pengelolaan kelembagaan Lumbung Pangan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan.

Indikator Impact

Tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu.

5.3. Pengembangan Program dan Kegiatan LPM

Panduan utama pembangunan LPM adalah Permentan 17/2015. Pengembangan LPM dilakukan selama 3 (tiga) tahun melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Dengan proses tersebut, diharapkan masyarakat mampu mengelola dan mengembangkan volume stok cadangan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh anggota dan masyarakat sekitar saat menghadapi kelangkaan pangan dan/atau menghadapi kerawanan pangan transien.

Kegiatan yang dilakukan pada **Tahap Penumbuhan** meliputi identifikasi kelompok dan lokasi, penetapan kelompok sasaran dan pemanfaatan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik lumbung pangan. Pembangunan fisik lumbung melalui difasilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian yang dibangun di atas lahan milik kelompok atau lahan yang sudah dihibahkan kepada kelompok.

Kegiatan pada **Tahap Pengembangan**, mencakup pengadaan bahan pangan untuk pengisian lumbung dan pengembangan kapasitas kelompok. Selanjutnya **Tahap Kemandirian**, kegiatannya mencakup penguatan kelembagaan kelompok dan pemantapan cadangan pangan serta kelembagaan cadangan pangan masyarakat. Ilustrasi dari tiga tahap kegiatan tersebut secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 5.2 sebagai berikut.



Gambar 5.1. Gambar 5.1. Model Pengembangan dan Operasional Kegiatan LPM (Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2021)

Berdasarkan tahapan pembangunan LPM, Kondisi aktual LPM di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah masuk kriteria tahap pengembangan, karena sudah menerima Dana Belanja Bantuan Sosial untuk pengisian lumbung. Namun langkah-langkah kegiatan pada masing-masing tahapan tidak terlaksana secara lengkap dan sekuen, dan paling memprihatinkan adalah tidak adanya lumbung yang dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian (Tabel 5.1). Seluruh lumbung dibangun hanya menggunakan Dana Bankeu Provinsi, APBD I, atau APBD II Kutai Kartanegara.

Tabel 5.9. Sumber Dana Pembangunan LPM di Kabupaten Kutai Kartanegara

Kecamatan	Desa	Kelengkapan Administrasi			Keterangan
		Surat Hibah	Lembaga	ADART	
Bankeu Provinsi Kalimantan Timur					
1) Tenggarong	Bendang Raya	Ada	-	-	
2) Tenggarong Seberang	Loa Lepu	Ada	Ada	-	LPM Sampel
3) Loa Janan	Tani Harapan	Ada	Ada	-	
4) Muara Kaman	Bunga Jadi	Ada	Ada	-	
5) Samboja	Karya Jaya	Ada	Ada	-	LPM Sampel
APBD I Provinsi Kalimantan Timur					
1) Samboja	Bukit Raya	Ada	Ada	-	LPM Sampel
2) Kota Bangun	Sari Nadi	Ada	Ada	-	
3) Tenggarong Seberang	Bangun Rejo	Ada	Ada	-	
4) Muara Kaman	Panca Jaya	Ada	Ada	Ada	LPM Sampel
5) Loa Kulu	Merangan	Ada	Ada	-	
6) Loa Kulu	Sumber Sari	Ada	Ada	Ada	LPM Sampel
APBD II Kabupaten Kutai Kartanegara					
1) Samboja	Beringin Agung	Ada	Ada	-	
2) Anggana	Sidomulyo	Ada	-	-	LPM Sampel
3) Kota Bangun	Muhuran	Ada	Ada	-	LPM Sampel
4) Kota Bangun	Sumber Sari	Ada	-	-	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara (2017).

Pembangunan LPM yang berhasil relevan dengan Misi ke-3 RPJMD 2021-2026, yaitu: “Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”. Implementasi pembangunan pertanian tersebut diperkuat dengan pernyataan Bupati bahwa, “Kutai Kartanegara harus menjadi lumbung pangan Kaltim, dan mempersiapkan diri menjadi lumbung pangan IKN”. Untuk itu, petani cara berpikirnya harus diubah, karena pemerintah daerah memiliki keinginan sektor pertanian dikelola secara modern, mulai dari perawatan, manajemen yang baik, hingga ekosistemnya dijaga secara lestari, jadi tidak hanya bicara terkait peningkatan produksi tetapi harus sampai pemasarannya. Seluruh OPD harus berpartisipasi aktif sesuai tupoksi untuk mensukseskan program ini, dan tahun 2024 diharapkan sudah harus terlihat hasilnya (POSKOTAKALTIMNEWS.COM, 27/6/2022).

Berdasarkan kebijakan pembangunan pertanian seperti diuraikan di atas dan kondisi pembangunan LPM yang belum berhasil hingga saat ini, maka untuk membangun LPM di Kutai Kartanegara menuju tahun 2024 (sesuai dengan pencaanangan Bupati) perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan reorientasi program pembangunan LPM sesuai dengan kondisi aktual saat ini di Kutai Kartanegara (karena pembangunan fisik lumbung tidak menggunakan DAK Bidang Pertanian) dengan melaksanakan seluruh kegiatan dari tahap penumbuhan, pengembangan, hingga kemandirian LPM sebagai berikut (Permentan 17/2015).

a. Tahap Penumbuhan

- (1) identifikasi desa dan kelompok (sentra produksi padi);
- (2) sosialisasi;
- (3) seleksi (LPM eksisting dan baru);
- (4) penetapan;
- (5) pembangunan fisik (lumbung baru/rehabilitasi lumbung eksisting); dan
- (6) inventarisasi.

b. Tahap Pengembangan

- (1) verifikasi;
- (2) penetapan;
- (3) sosialisasi kegiatan;
- (4) pelatihan pengurus dan penyusunan RUK;
- (5) penyaluran Dana Belanja Bantuan Sosial;
- (6) pengisian cadangan pangan;
- (7) penguatan kelembagaan;
- (8) penguatan cadangan pangan; dan
- (9) pembinaan.

c. Tahap Kemandirian

- (1) penyaluran dana Bantuan Sosial untuk penguatan modal;
 - (2) pemantapan kelembagaan lumbung pangan;
 - (3) pemantapan Cadangan Pangan;
 - (4) pelatihan dalam rangka menunjang keberlanjutan; dan
 - (5) pendampingan.
- 2) Mengimplementasikan strategi pembangunan LPM (Permentan 17/2015) sebagai berikut:
- a. Strategi Standar** Pengembangan LPM adalah: (1) memberikan dukungan kepada kelompok untuk memperkuat kemampuannya dalam penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan, sehingga mudah diakses dan tersedia setiap waktu secara berkelanjutan; (2) memberikan dukungan kepada kelompok untuk penguatan kelembagaan agar mampu mengembangkan usaha kelompok untuk keberlanjutan kelembagaan lumbung pangan. Adapun penjabaran Strategi Dasar Pengembangan LPM diperlukan 24efinit-langkah kegiatan pelaksanaan sebagai berikut:
 - (1) peningkatan kemampuan sumber daya manusia, melalui pelatihan dan pembinaan;
 - (2) penguatan cadangan pangan; dan
 - (3) penguatan kelembagaan kelompok.

b. Strategi Keberlanjutan Program LPM, pemerintah daerah melanjutkan pembinaan terhadap kelompok LPM yang telah memasuki tahap pasca mandiri melalui:

- (1) memelihara keberlanjutan cadangan pangan yang ada di kelompok lumbung pangan masyarakat;
- (2) menerbitkan regulasi melalui Peraturan Bupati agar kelompok mendapatkan pembinaan dalam meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan keberlanjutan;
- (3) menyediakan alokasi dana APBD baik provinsi maupun kabupaten untuk pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan kelompok;
- (4) meningkatkan kemampuan pengurus dalam pengelolaan cadangan pangan dan kemitraan secara berkelanjutan;
- (5) melakukan advokasi dalam rangka penyerahan asset LPM kepada kelompok.

Berdasarkan reorientasi program/kegiatan dan implementasi strategi pembangunan LPM tersebut di atas, diperlukan kebijakan sebagai berikut: (1) lokus pembangunan LPM difokuskan pada sentra produksi padi dan LPM eksisting yang telah memiliki bangunan fisik lumbung dalam kondisi baik; (2) fokus pelaksanaan kegiatan adalah pada konsistensi tahapan kegiatan, penetapan (dengan SK Bupati) OPD dan personalia penanggung jawab masing-masing kegiatan, dan alokasi dukungan pendanaan APBD/sumber lain yang rasional.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan data dan informasi yang dapat dikumpulkan dari hasil observasi LPM di lapangan dan analisis yang telah dilakukan, dalam kajian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kondisi fisik bangunan lumbung yang diobservasi, dari delapan unit lumbung: satu bangunan lumbung telah dialih fungsikan menjadi balai pertemuan, empat bangunan lumbung dalam kondisi rusak berat hingga ringan, dan tiga unit bangunan lumbung dalam kondisi baik.
- 2) Secara umum LPM yang diobservasi belum dikelola dengan baik, kecuali untuk LPM Desa Sumber Sari di Kecamatan Loa-Kulu. Pengelolaan LPM belum/tidak memiliki kepengurusan yang definitive, sehingga berdampak pada tidak tersusunnya RUK (rencana usaha kelompok), ADART, ataupun POS (prosedur operasional standar) untuk pengelolaan LPM.
- 3) Kegiatan pembinaan dan pendampingan pengelolaan LPM oleh OPD yang berwenang tidak berjalan dengan lancar. Sehingga peningkatan kualitas SDM pengelola LPM dan peningkatan kualitas kelembagaan LPM tidak terjadi seperti yang diharapkan.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, dan dalam upaya perbaikan atau pengembangan program LPM pada masa mendatang. Kemudian, pengembangan LPM diharapkan mampu meningkatkan cadangan pangan masyarakat, dan akhirnya dapat mendukung implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa mendatang, maka diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Melakukan reorientasi program pembangunan LPM secara tertib berpedoman pada Permentan 17/2015, mulai dari tahap penumbuhan, pengembangan, hingga kemandirian LPM, dengan menetapkan lokus LPM pada sentra-sentra produksi padi dan LPM eksisting yang memiliki bangunan lumbung permanen dalam kondisi baik.
- 2) Menetapkan (dengan SK Bupati) OPD dan personalia penanggung jawab untuk masing-masing kegiatan dalam seluruh tahapan pembangunan LPM, dan dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan (Lampiran 1).
- 3) Mengimplementasikan secara konsisten **Strategi Keberlanjutan Program LPM**. Pemerintah daerah melanjutkan pembinaan terhadap kelompok LPM yang telah memasuki tahap pasca mandiri melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. memelihara keberlanjutan cadangan pangan yang ada di kelompok lumbung pangan masyarakat;
 - b. menerbitkan regulasi melalui Peraturan Bupati agar kelompok mendapatkan pembinaan dalam meningkatkan fungsi kelem-bagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan keberlanjutan;
 - c. menyediakan alokasi dana APBD baik provinsi maupun kabupaten untuk pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan kelompok;
 - d. meningkatkan kemampuan pengurus dalam pengelolaan cadangan pangan dan kemitraan secara berkelanjutan;
 - e. melakukan advokasi dalam rangka penyerahan asset LPM kepada kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

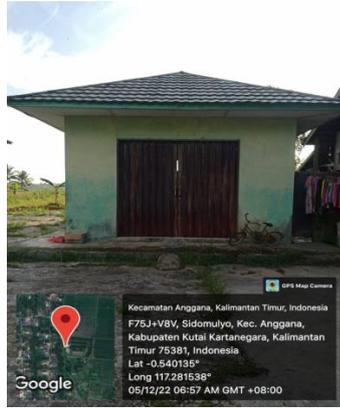
- BPS KALTIM. 2022. Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2022. BPS Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.
- BPS KALTIM. 2021. Luas Panen dan Produksi Padi di Kalimantan Timur 2021. BPS Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.
- Departemen Pertanian. 1996. *Direktori Pengembangan Konsumsi Pangan*. Badan Ketahanan Pangan, Jakarta.
- FAO. 2016. *Indonesia and FAO Partnering for Food Security and Sustainable Agricultural Development*.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 17/Permetan/HK. 140/4/2015. Tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60.
- Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2021. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 143.
- Suyadi. 2021. Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan di Kalimantan Timur. *Dalam* Pembangunan Pertanian. Saragih, B. dan Ahmad R. U. P. (editor). Deepublish Publisher, Yogyakarta. Hal. 58-64.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 227.

Lampiran 1. Jenis dan Jadwal Kegiatan dalam Tiga Tahap Pembangunan LPM di Kabupaten Kutai Kartanegara.

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Jadwal Kegiatan
a. Tahap Penumbuhan			
1	Identifikasi desa dan kelompok (sentra produksi padi)	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan,	Semester 1, 2023
2	Sosialisasi	Dinas Ketahanan Pangan,	Semester 1, 2023
3	Seleksi (LPM eksisting dan baru)	Dinas Ketahanan Pangan,	Semester 1, 2023
4	Penetapan	Dinas Ketahanan Pangan,	Semester 1, 2023
5	Pembangunan fisik (lumbung baru/ rehabilitasi lumbung eksisting)	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum,	Semester 2, 2023
6	Inventarisasi	Dinas Ketahanan Pangan	Semester 2, 2023
b. Tahap Pengembangan			
7	Verifikasi	Dinas Ketahanan Pangan, BAPPEDA,	Semester 2, 2023
8	Penetapan	Dinas Ketahanan Pangan, BAPPEDA	Semester 2, 2023
9	Sosialisasi kegiatan	Dinas Ketahanan Pangan	Semester 2, 2023
10	Pelatihan pengurus dan penyusunan RUK	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM,	Semester 2, 2023
11	Penyaluran Dana Belanja Bantuan Sosial	Dinas Ketahanan Pangan	Semester 1, 2024
12	Pengisian cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Koperasi dan UKM, Swasta, Pemerintah Desa, swadaya masyarakat.	Semester 1, 2024

13	Penguatan kelembagaan	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Semester 1-2, 2023
14	Penguatan cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, BAPPEDA, Swasta, Pemerintah Desa, swadaya masyarakat.	Semester 2, 2024
15	Pembinaan	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Koperasi dan UKM	Semester 1, 2023 Dst
c. Tahap Kemandirian			
16	Penyaluran dana Bantuan Sosial untuk Penguatan modal	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, BAPPEDA, Swasta, Pemerintah Desa, swadaya masyarakat.	Semester 2, 2024
17	Pemantapan kelembagaan lumbung pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Semester 1-2, 2024
18	Pemantapan Cadangan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Koperasi dan UKM	Semester 2, 2024 dst
19	Pelatihan dalam rangka menunjang keberlanjutan	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Koperasi dan UKM	Semester 2, 2024
20	Pendampingan	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Semester 1, 2023 dst

Lampiran 2. Foto-foto Lumbung yang Diobservasi



Gambar 1. Bangunan Lumbung di Kecamatan Anggana, Desa Sidomulyo



Gambar 2. Bangunan Lumbung di Kecamatan Samboja, Desa Karya Jaya



Gambar 3. Bangunan Lumbung di Kecamatan Marang Kayu, Desa Sebuntal



Gambar 4. Bangunan Lumbung di Kecamatan Muara Jawa, Tama Pole



Gambar 5. Bangunan Lumbung di Kecamatan Tenggarong Seberang, Desa Loa Lepu



Gambar 6. Bangunan Lumbung di Kecamatan Loa Kulu, Sumber Sari



Gambar 7. Bangunan Lumbung di Kecamatan Kota Bangun, Desa Muhuran



Gambar 8. Bangunan Lumbung di Kecamatan Kaman, Panca Jaya